

MELAMPAUI TOLERANSI MENGEJA AKSEPTANSI BERAGAMA

Syamsul Asri

Inter-Religious Studies Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Email: sasri@ugm.ac.id

Abstract

Tolerance, in this article, is articulated as a practice of living in inter-religious communities that is no longer capable of caring for and supporting religious diversity in Indonesia. Tolerance presupposes the ability of adherents of a religious identity to endure the wounds and suffering caused by the presence of adherents of another religious identity. This article aims to offer acceptance/penerimaan and akseptansi [in Bahasa Indonesia] as a daily discourse practice to replace tolerance. Acceptance presupposes that individuals and groups of adherents of a religious identity accept the presence of adherents of another religious identity as it is, without necessarily assuming that the presence of adherents of other religions inherently brings suffering to them. This goal is achieved by deploying the identity theories of Amartya Sen and Hubert Hermans, where for these two thinkers, religious identity can always be interpreted as the presence of oneself in the presence of another self without having to tolerate [announcing oneself that the other party always brings suffering to oneself] but rather accepting another identity as it is.

Keywords:

Tolerance, Acceptance, Identity, Inter-religious Relation

Abstrak

Toleransi, dalam tulisan ini, dipandang sebagai praktik hidup lintas agama yang tidak lagi mumpuni dalam merawat dan menghidupi keragaman keberagaman di Indonesia. Toleransi mempraanggapkan adanya kesanggupan pemeluk suatu identitas keagamaan untuk menanggung luka dan derita yang ditimbulkan oleh kehadiran pemeluk identitas agama lain. Tulisan ini bertujuan untuk menawarkan *acceptance* / penerimaan / akseptansi dalam Bahasa Indonesia sebagai praktik wacana keseharian pengganti toleransi. Akseptansi mempraanggapkan bahwa individu dan kelompok pemeluk suatu identitas keagamaan menerima kehadiran pemeluk identitas keagamaan lain apa adanya, tanpa mesti menganggap kehadiran pemeluk agama lain secara inheren membawa derita bagi dirinya. Tujuan ini dicapai dengan mengerahkan teori identitas dari Amartya Sen dan Hubert Hermans, di mana bagi kedua pemikir ini, identitas keagamaan selalu bisa dimaknai sebagai kehadiran diri di hadapan diri lain tanpa mesti mentoleransi [memaklumkan diri sendiri bahwa pihak lain senantiasa membawa derita bagi diri] melainkan mengakseptansi identitas lain.

Kata Kunci:

Toleransi; Akseptansi; Identitas; Relasi Lintas Agama

PENDAHULUAN

Dalam sebuah diskusi kelompok terfokus di awal tahun 2019, Bapak Alwi Rachman, seorang akademisi senior dari dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, mengemukakan argumen yang sepenuhnya baru bagi saya (Sofjan & Asri, 2019). Bagi Rachman, ada yang perlu dievaluasi dalam wacana toleransi antar umat beragama. Secara faktual, toleransi dalam hal keberagaman telah diterima sebagai pakem kebijaksanaan publik yang sedikit sekali upaya untuk membahas dan menginterogasinya sebagai wacana. Di sini wacana dipahami secara luas sebagai praktik berbahasa dan semua hal yang terkait dengan bahasa sebagai proyek mendefinisikan dan membentuk dunia, baik dunia psikologis maupun dunia sosial. Bahasa dimaknai bukan hanya sebagai medium komunikasi untuk menyampaikan pesan komunikatif, melainkan lebih dari itu, bahasa dimengerti sebagai pengungkapan dunia. Pengalaman kebahasaan dipahami sebagai pengalaman mendunia.

Bagi Alwi Rachman, kata toleransi yang berasal dari bahasa Inggris, *to tolerate*, menandai hadirnya kerelaan satu pihak untuk menanggung derita, serta memaklumi kehadiran derita itu, yang disebabkan oleh pihak lain yang berbeda. (*Tolerate - Advanced Search Results in Entries | Oxford English Dictionary*, n.d.) Mentolerir sesuatu artinya disakiti oleh sesuatu tersebut, namun sebagai pihak yang disakiti, seseorang bisa menanggung kehadiran sesuatu tersebut, juga derita yang ditimbulkannya. Hadir semacam relasi masokis dalam semua praktik bertoleransi. Rasa sakit dan derita, yang ditimbulkan oleh satu pihak dan diterima serta ditanggung pihak lain, tidak terelakkan di sini.

Alwi Rachman melihat kondisi “terdera oleh derita” juga “bersama dalam derita” ini sebagai gejala kemalangan sosial yang sebenarnya bisa dihindari. Alwi Rachman berkehendak mengganti kata toleransi dengan kata akseptansi, yang berasal dari kata Bahasa Inggris, *to accept/acceptance*, yang artinya adalah penerimaan; menerima pihak lain apa adanya, yang kehadirannya dan keutuhan dirinya sama sekali tidak menyakiti siapa pun di ruang sosial.

Walau tidak menjelaskan dasar dari epistemologi linguistik argumentasinya, saya yang juga hadir dalam kegiatan diskusi berkelompok yang dihadiri Alwi Rachman ini, menemukan bahwa argumentasi ini punya postulasi yang bisa

dikembangkan lebih jauh. Seturut Roland Barthes yang mengargumenkan bahwa praktik berbahasa, praktik bertutur, berkata-kata, menulis dan membaca, bukan hanya bertujuan untuk mengkomunikasikan sesuatu, dari satu pihak ke pihak lainnya. Namun lebih mendasar lagi dari itu, praktik berbahasa merupakan praktik pemaksaan untuk bertutur *tentang* sesuatu dan *menghidupi* sesuatu itu. Tendensi fasistik ini inheren dalam bahasa (Barthes, 2013). Sehingga pilihan penggunaan suatu kata, dan bukan kata yang lainnya, beserta kemungkinan makna yang disediakan oleh kata dan jaringan kata tersebut merupakan pilihan antara hidup dan mati.

Postulasi ini mendasari pemilahan dan pemilihan Alwi Rachman antara kata toleransi dan akseptansi. Walaupun dalam bahasa aslinya yakni Bahasa Inggris, kata *to tolerate* dan kata *to accept* sering kali dipadankan sebagai sinonim, misalnya oleh Oxford English Dictionary (*To Accept - Advanced Search Results in Entries | Oxford English Dictionary*, n.d.), bagi Rachman, seorang dosen sastra dan komentator budaya dan literasi, kata akseptansi lebih mengena sebagai ruang pertemuan antara pihak yang berbeda identitas, yang di dalamnya, rasa sakit dan derita bukanlah penghubung utama antar penutur bahasa Indonesia, melainkan kebaikan, rasa ingin tahu, keriang dan penjelajahan. Akseptansi mempranggapkan bahwa penutur bahasa Indonesia yang berbeda-beda identitas ini, termasuk di dalamnya identitas keagamaan, bertemu dan bertukar kata berdasarkan penerimaan apa adanya satu sama lain, juga semacam janji untuk menjelajah semesta bahasa dan semesta diri bersama-sama. Identitas, yang dimaknai sebagai identifikasi diri oleh diri dan yang lain/liyan, muncul dan berkembang dalam rupa yang berbeda antara identitas dalam praktik bahasa toleransi, dan identitas dalam praktik bahasa akseptansi. Identitas adalah pertarungan dalam pemilahan dan pemilihan penggunaan kata toleransi atau akseptansi dalam konteks ini.

Seturut Alwi Rachman dan Barthes, saya mengajukan agar akseptansi diterima dan digunakan seluas-luasnya dalam praktik berbahasa lintas agama di tanahair. Untuk mencapai hal ini, saya menjadikan teori identitas dari Amartya Sen dan Hubert Hermans sebagai titik berangkat. Kedua pakar dengan dua teori identitas ini dipilih sebab keduanya, dengan cara yang berbeda dan bagi saya saling melengkapi, dapat membantu kita memahami di satu sisi bahaya dari kekerasan yang muncul dari

pemaksaan identitas, dan di sisi lain memberi kita pandangan elaboratif tentang luasnya kemungkinan beridentitas yang hadir saat ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini sepenuhnya berasal dari tradisi riset kualitatif. Dimulai dengan memeriksa penggunaan kata toleransi dalam bahasa Inggris & Indonesia dan kata acceptance/penerimaan/akseptansi dalam Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris, penulis kemudian membangun argumen teoritis spekulatif (*theory building*) tentang relasi identitas antar pemeluk agama di Indonesia. Dengan mengandalkan diri pada metode pengumpulan data primer dan sekunder melalui studi pustaka, data-data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis wacana kritis *a la* Norman Fairclough (Fairclough, 2010). Metode triangulasi sumber data digunakan untuk memastikan data yang tersaji bisa diandalkan.

Pada titik ini, saya ingin mengelaborasi beberapa literatur kiwari perihal identitas yang bersesuaian dengan praktik berbahasa akseptansi. Yang *pertama* adalah *An Analysis of Amartya Sen`s Development as Freedom*, Routledge; London, 2017 oleh Janna Miletzki & Nick Broten, yang mengeksplorasi kelewusan makna identitas yang diadvokasi oleh Amartya Sen (Miletzki & Broten, 2017). Bagi Sen, identitas tidak pernah monoton dan monolitik, melainkan hadir sebagai rangkaian yang kompleks, sebagai relasi diri dengan keberdayagunaannya (*capability*) dan kemerdekaannya (*freedom*) di ruang sosial. seseorang bisa sekaligus merangkap sebagai dosen, istri, anak tertua, penikmat teh hijau, Kristiani, Jawa, penyuka kucing dan sederet rangkaian yang bisa jadi tidak terbatas. Kekerasan di ruang sosial hadir karena adanya peringkusan rangkaian identitas ini menjadi satu identitas tunggal yang mengeras dan menajam; Jawa Kristen yang anti Cina Muslim, misalnya. Seseorang, siapapun itu, tidak bisa diringkus ke dalam hanya satu identitas, disebabkan ruang sosial yang mengelilingi individu hadir seketika dengan tawaran relasi diri merangkap yang kompleks bagi tiap-tiap individu, bergantung pada posisi sang individu, kapabilitas dan kemerdekaannya (Sen, 2011, 2015).

Literatur *kedua* berjudul *Religious or Spiritual Experiences and Bipolar Disorder: A Case Study from the Perspective of Dialogical self Theory* oleh Eva Ouwehand dkk yang membahas kompleksitas teori identitas yang ditawarkan oleh Hubert Hermans (Ouwehand et al., 2020). Dinamai *dialogical self theory*, secara substansial Hermans mengargumenkan bahwa identitas seseorang, siapapun itu, selalu tumbuh dan difasilitasi oleh pertemuan dan dialog dengan orang dan kejadian lain di luar dirinya. Tidak ada identitas yang tumbuh dalam ruang hampa interaksi sosial. Sebagai subjek yang beridentitas, saya berdialog maka saya ada adalah diktum teori ini (Gieser & Hermans, n.d.; H. Hermans, 2012). Perlu dicatat bahwa subjeksi di sini bukanlah subjek ala Cartesian yang menundukkan dunia dan orang lain di bawah kategori intelektual yang bisa dikendalikan, melainkan subjek yang membuka dirinya kepada subjek lain. Subjek di sini semacam spons berongga yang senantiasa menyambut kehadiran pihak lain. Identitas, layaknya spons, bukanlah bangunan tembok yang selesai dan utuh, melainkan selalu dinamis dan tumbuh, dikarenakan perjumpaan dialogis dengan pihak lain yang berbeda.

Literatur ketiga berjudul *Interreligious Solidarity as a Benefit of Divine Hiddenness* oleh Milos Holda (Hołda, 2023) yang membahas konsep klasik dari Peter C. Phan yakni keberagamaan yang lintas agama yang ia kembangkan pertama kali dalam bukunya *being religious interreligiously*. Holda menyoroti relevansi ide Phan yang semakin hari semakin mampu memotret kebutuhan keseharian kita untuk mengadvokasi identitas keberagamaan yang tidak hanya ramah kepada yang lain yang berbeda, melainkan juga melihat dan menerima yang lain apa adanya, bukan sebagai subjek yang mengancam dengan rasa sakit dan derita, melainkan sebagai refleksi diri yang menawarkan kekayaan sudut pandang dalam mengenali kembali kedirian keberagamaan kita secara kreatif (Phan, 2004).

Meski tampak menempuh jalur yang berbeda dalam menjelaskan perihal identitas, saya melihat bahwa kerangka ide dan dasar postulasi yang dikembangkan oleh Amartya Sen dan Hubert Hermans bisa saling melengkapi dalam merumuskan dasar-dasar wacana akseptansi beragama sebagai pengganti wacana toleransi beragama. Penelitian ini bermaksud menjawab pertanyaan; bagaimana menjelaskan

wacana akseptansi beragama dengan menggunakan teori identitas dari Amartya Sen dan Hubert Hermans?

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian yang mengargumenkan bahwa praktik berbahasa lintas agama dengan kosa kata toleransi selayaknya digantikan dengan praktik berbahasa lintas agama dengan kosa kata akseptansi. Selain tidak presisi memotret identitas dan relasi antar identitas umat beda agama di tanahair, kata toleransi juga mencederai makna kehadiran diri yang berbeda di hadapan satu pemeluk agama yang berbeda sebab kata toleransi meneguhkan kehadiran pihak lain sebaai pihak pembawa derita yang mesti diterima. Di lain pihak, akseptansi menegaskan keberbedaan sebagai natura yang diterima; orang lain beda agama yang berbeda bukanlah pihak yang membawa derita dan meminta permakluman atas kehadirannya, melainkan keberbedaan yang hadir begitu saja dan memperkaya identitas semua pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mempersoalkan Toleransi Beragama

Walau tidak secara resmi masuk ke dalam salah satu dari ketiga bentuk pengaturan kehidupan beragama di Indonesia (ketiganya adalah kemerdekaan beragama, kerukunan beragama, dan moderasi beragama (Zainal Abidin Bagir & Husni Mubarak, 2021) bisa dipastikan bahwa toleransi beragama menjadi *default setting* praktik berbahasa perihal relasi satu identitas keberagamaan dengan identitas lain yang berbeda. Dalam mempersepsi dan menangani keragaman keberagamaan, toleransi menduduki posisi utama sebagai pranata kebijakan publik di Indonesia; di sekolah, di pasar, di perumahan, di kantor, terlebih lagi di ranah politik pemerintahan dengan corak otoritasnya yang normatif menjadi garda terdepan mengartikulasikan toleransi ini. seolah-olah nalar publik tanahair tidak sanggup mengeja dan menemukan kata lain, yang bisa jadi lebih tepat secara bahasa, dan lebih berkeadilan secara etis.

Dari ketiga praktik wacana pengelolaan kehidupan publik perihal keberagamaan di atas, kerukunan beragama era Orde Baru juga moderasi beragama era Jokowi menyuburkan preferensi publik atas toleransi sebagai modus *default* interaksi sosial antar pemeluk agama yang berbeda. Berbeda halnya dengan kebebasan

beragama, yang merupakan satu-satunya modus penegelolaan kehidupan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang dasar 1945, kerukunan beragama dan moderasi beragama merupakan praktik berbahasa yang tidak hanya tidak punya dasar hukum konstitusional yang kuat, juga menyalahi hukum, sebab kebebasan beragama disudutkan sebagai idea normatif yang tidak realistis.

Pada masa Orde Baru, kerukunan beragama menjadi ancaman rezim Soeharto atas keragaman keberagamaan publik, sehingga alih-alih hidup rukun secara organik, masyarakat dipaksa hidup rukun demi hadirnya ketertiban sosial yang menjadi syarat utama suksesnya pembangunanisme (*developmentalism*) Orde Baru. Dinamika serupa dijumpai pula dalam moderasi beragama sebagai praktik berbahasa resmi *a la* rezim Jokowi. Mendapati dirinya dalam himpitan elektabilitas dan krisis legitimasi akut, Jokowi yang awalnya dipandang sebagai subjek politik paling demokratis, memilih moderasi beragama sebagai senjata guna melumpuhkan apa yang rezimnya persepsi sebagai radikalisme dan intoleransi beragama, dua preferensi identitarian yang secara konstituen berada di seberang kubu Jokowi.

Baik Soeharto maupun Jokowi (juga kebanyakan Presiden Indonesia dengan pengecualian Soekarno sebelum 1949, B. J. Habibie, dan Abdurrahman Wahid) gagal memulihkan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 29 perihal kebebasan beragama sebagai ideal normatif penegelolaan kehidupan keberagamaan tanahair. Kedua rezim ini, diperdalam oleh 10 tahun masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, menyuburkan penggunaan kata toleransi dalam matriks berbahasa antar pemeluk agama yang berbeda. Jika kita berani berandai-andai; andai saja kebebasan beragama yang jadi *default setting* semua perbincangan soal penataan kehidupan keberagamaan, maka sangat mungkin kosa kata lain selain toleransi akan mencuat dan menjadi rumah makna bagi publik Indonesia.

Toleransi beragama dibangun di atas postulasi yang menganggap identitas satu individu dan suatu kelompok pemeluk agama berada dalam kondisi selalu menyakiti dan disakiti oleh identitas individu dan kelompok penganut agama lain. Pemeluk agama, apa pun latar belakang agamanya, dipandang secara *default* sebagai pembawa derita yang merugikan pihak lain. Tidak berhenti di situ, toleransi juga mengandaikan hadirnya subjek sosial yang tangguh dalam menerima lalu menahan derita yang

ditimbulkan oleh pihak lain. *To tolerate* dalam bahasa Inggris memang diartikan kesanggupan untuk bersama-sama secara sosial dengan orang lain yang membuat gusar, gulana, menderita, merepotkan, mengganggu.

Dalam matriks toleransi beragama, selalu hadir 1) pihak yang merugikan, yang lebih sering merasa di posisi yang benar dan karenanya meminta dimaklumi tindakannya, 2) pihak yang dirugikan, yang diminta/diharap/diposisikan untuk menerima dan menanggung kerugian 3) tindakan merugikan orang lain, yang jarang dibawa ke dalam proses hukum karena dikhawatirkan akan mengganggu kerukunan dan moderasi beragama, 4) otoritas hukum yang duduk diam di hadapan pelanggaran hukum, yang membiarkan pelanggaran hukum atas nama penegakan ketertiban yang lebih umum/besar.

Jika bahasa dan kata-kaya yang menyusunnya bukanlah sekadar tindakan menyampaikan pesan dan maksud tertentu dari satu pihak kepada pihak lain, melainkan juga relasi kuasa yang memaksakan penggunaan seutas makna dan menyingkirkan makna lainnya, maka kata toleransi dan sistem relasi antar kata yang melatarbelakangi dan mengikutinya perlu diubah. Alternatif bagi kata toleransi adalah kata akeptansi, yang sama halnya dengan kata toleransi yang diserap dari bahasa asing, kata akseptansi juga diserap dari bahasa Inggris. Secara mendasar, akseptansi berarti menerima, dalam konteks keragaman keberagaman tanahair, akseptansi mengakui keragaman sebagai kondisi yang diterima dan dirayakan. Kehadiran pihak lain yang berbeda diterima begitu saja sebagai kenyataan di luar diri. orang lain dipersepsi sebagai sesama yang sama; sama-sama meng-ada, berkendak untuk tumbuh kembang, sama-sama bermartabat, dan sama-sama menolak kehinaan. Sama sekali tidak ada postulasi perihal orang lain sebagai pembawa derita yang butuh dimaklumi dalam matriks bahasa akseptansi.

Tulisan ini meminjam perangkat analisis identitas dari Amartya Sen dan Hubert Hermans untuk menguji dan memastikan secara teoritis keabsahan menggeser kata toleransi beserta semesta linguistiknya dengan kata akseptansi beserta semesta linguistiknya. Identitas, dalam hal ini identitas keberagaman, saya pandang sebagai ranah pemeriksaan yang paling krusial untuk membuktikan betapa tidak mumpuninya

kata toleransi sekaligus betapa menjanjikannya kata akseptansi dalam mempersepi, menghidupi dan mengolah kehidupan beragama yang plural di tanahair.

Identitas sebagai Kemerdekaan menurut Amartya Sen

Terutama sekali relevan dengan wacana akseptansi beragama adalah buku Sen yang berjudul *identity and violence* (Sen, 2015). Yang fundamental dari analisa Sen dalam buku terbitan tahun 2007 ini adalah persistensinya dalam mengargumenkan bahwa apa itu yang sosial tidaklah monolitik dalam hubungannya dengan kebebasan individu. Di sini, yang mau dikatakan oleh Sen adalah identitas individu bersifat relasional yang kompleks. Adalah suatu kejahatan, bagi sen, untuk mereduksi individu hanya berdasar satu kategori tunggal identitas, entah agama, ras, kelas, kewarganegaraan (*citizenship*), orientasi seksual, hobi atau identitas lain.

Bagi Sen, tiap-tiap individu adalah semesta relasi dengan yang sosial; ia bisa saja seorang perempuan muslim penikmat moto GP, penyayang kucing, pembela hak warga gay dan transgender, aktivis lingkungan, penikmat es krim, kolektor perangko, sejarawan sains, pemilik kulit berwarna yang gemar politik pascakolonial dan suka sekali baca novel Pramoedya A. Toer. Sangat beragam dan kompleks.

Kebebasan bukanlah kebebasan soliter, juga bukan kondisi berdaya untuk menghancurkan yang sosial. Sekali lagi, bagi Sen, kebebasan adalah kapasitas individual untuk berdaya dalam konteks merawat, mengkritik dan mentransformasi relasi sosial dan ruang sosialnya yang kompleks, yang telah melahirkan dan membesarkan individu. Akseptansi beragama bukanlah pengecualian dalam hal ini. Walau tidak pernah secara khusus menganalisa akseptansi, Sen menggumuli wacana hak asasi manusia sebagai ranah pembangunan (*development*) transformatif.

Akseptansi beragama menggaungkan, secara prinsipil, kebebasan bagi semua individu manusia untuk mengimani, memikirkan, merasakan dan menggumuli religiusitasnya sebagai bagian dari proses menemukan dan mengembangkan dirinya. Pun akseptansi beragama menjamin kebebasan semua individu manusia untuk mengeksposikan religiusitas ini walau pembatasan-pembatasan tertentu perlu dicermati agar individu lain tidak mengalami pelanggaran hak.

Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi kemungkinan kontribusi buku Sen *identity and violence* dalam percakapan tentang posisi dan relasi kebebasan individu dengan akseptansi beragama. Tujuan ini dicapai dengan menjawab pertanyaan apa makna kebebasan individu dalam buku *identity and violence* dan bagaimana pemaknaan ini bisa mendorong lebih dalam percakapan perihal relasi dan posisi kebebasan individu dalam wacana dan praktik sehari-hari akseptansi beragama.

Kebebasan bagi Amartya Sen dalam *identity and violence* merupakan kapasitas dan kemampuan individu untuk berpikir, berkata dan bertindak dalam ruang sosial dan relasi sosial, di mana individu tidak dalam paksaan harus memilih satu horizon identitas dan identifikasi diri tunggal. Buku ini adalah wadah bagi argumenasi Sen yang gelisah melihat kekerasan (*violence*) terus muncul di sekitar konsolidasi identitas tunggal yang menajam. Argumen utama Sen adalah kekerasan muncul disebabkan tegaknya pemahaman identitas individu itu tunggal, baik agama, etnis maupun ras. Si Baco itu Muslim, bukan Kristen. Si Sola itu Kristen bukan Muslim. Logika identitarian ini gampang dipertajam dan dipakai oleh demagog untuk mengiris orang lain yang dianggap berbeda secara radikal.

Tentu saja logika ini salah sekaligus jahat. Dalam kehidupan nyata tentu saja Baco dan Sola bisa menemukan satu atau beberapa identitas yang menyatukan mereka; sama-sama laki-laki, sama-sama penikmat sepakbola, sama-sama aktivis perlindungan hewan, sama-sama suka berenang, serta ribuan identitas dan identifikasi diri lainnya yang tersedia bagi keduanya dalam relasi sosial kompleks yang melingkupi sekaligus ditransformasi oleh keduanya.

Kebebasan dalam konteks ini persisnya adalah kapasitas dan kapabilitas untuk berkata “Tidak” kepada semua upaya meringkus individu dalam satu horizon identitas tunggal. Ini dimungkinkan sebab setiap individu sedari awal telah terbenam dalam jejaring relasi identitas kompleks dengan orang lain. Individu mutlak bebas melihat dirinya terpaut dalam beragam identitas sekaligus di setiap ruang dan waktu. Seturut konteks sosial dan kebutuhannya, tiap-tiap individu bebas pula berganti identitas. Merawat kondisi ini merupakan salah satu prasyarat sekaligus bentuk pembagunan bagi Sen.

Lebih lanjut, dalam semesta konsep Sen, makna perkembangan dan pertumbuhan individu senantiasa dimaknai dalam relasinya yang positif dan konstruktif dengan yang sosial. Kebebasan bukanlah bebas untuk soliter, bukan pula bebas untuk menghancurkan relasi sosial, sebab relasi sosial-lah yang mengkondisikan kebebasan individu. Yang sosial merawat dan menjaga eksistensi individu. Pada gilirannya individu yang berkembang berdasarkan kebebasannya untuk mampu berkata “Tidak” kepada paksaan identitarian akan terus menerus mentransformasi yang sosial sehingga dialektika ini menjadi bantahan kepada asumsi yang melihat individu sebagai agen soliter.

Di sini individu bukanlah subjek mengambang tanpa konteks yang bisa lepas melayang ke mana-mana. Namun individu juga bukan entitas monolitik yang membonsai dirinya ke dalam relasi monolitik dengan satu horizon identitas. Ini mustahil, bagi Sen, sebab yang sosial di sebut sebagai yang sosial karena dalam dan dengan yang sosiallah individu menemukan relasi kompleks yang beragam dengan individu lain. Yang sosial berhenti menjadi yang sosial jika tidak ada di dalamnya kompleksitas relasional antara satu individu dengan individu yang lain.

Tidak berlebihan untuk melihat mengapa Sen sangat gusar atas relasi reduksionis identitas dengan kekerasan. Kekerasan individu dan kelompok kepada individu dan kelompok lain adalah simptom atau produk dari represi atas pikiran merdeka tiap individu yang dipaksa melepaskan kebebasannya memeluk sekaligus beragam identitas. Individu yang tidak sanggup berkata “Tidak!” kepada paksaan identitas monolitik sedang berada dalam relasi negatif dengan yang sosial.

Atau lebih tepatnya individu tersebut sedang melepaskan dirinya, untuk sesaat, dari yang sosial. Hasilnya adalah kekerasan; orang lain berhenti menjadi sesama. Orang lain mulai tampak sebagai yang sepenuhnya berbeda. Persamaan antara diri dengan orang lain mulai hilang. Kondisi ini menggelisahkan, tentu saja, sehingga individu gelisah ini akan menemukan kedamaian hanya jika relasinya dengan yang sosial dipulihkan. Apa lacur, demagog ideolog identitarian monolitik melihat ini sebagai peluang konsolidasi identitarian. Saat berkumpul dalam kelompok yang beranggotakan sesama individu yang tercerabut dari yang sosial, individu akan melihat, walau secara salah, bahwa relasinya dengan yang sosial telah pulih. Tentu

saja tidak, sebab yang sosial secara esensial adalah kompleksitas relasional individu dengan keragaman, baik keragaman individu lain maupun keragaman konteks di mana relasi ini muncul.

Salah identifikasi dengan yang sosial ini selanjutnya diarahkan untuk melukai orang lain yang dianggap mutlak berbeda melalui mekanisme menganggap bahwa orang lain yang berbeda ini mengancam relasi individu (yang gelisah) dengan yang yang sosial (yang keliru diidentifikasi).

Sesama, sejauh ini, membawa makna yang kompleks dalam analisa Sen terkait identitas dan kekerasan. Di satu sisi sesama adalah individu dan kelompok lain yang pasti bisa didekati dengan adab sebab setiap individu bisa menemukan suatu atau beberapa identitas yang menghubungkannya dengan individu lain (sama-sama penghuni planet bumi, misalnya). Namun di sisi lain, sesama dan kesesamaan adalah alibi bagi kekerasan brutal yang ditimpakan kepada yang dianggap berbeda. Kekerasan dilakoni sebab individu lain dianggap secara radikal berbeda serta dianggap pula mengancam keutuhan kesesamaan yang secara keliru diperjuangkan oleh pelaku kekerasan.

Kompleksitas ini berakar dalam kenyataan bahwa yang sosial memang kompleks; yang sosial menyatukan sekaligus memisahkan individu dalam jutaan cara yang tampak maupun subtil. Namun, bagi Sen, pemisahan oleh yang sosial bukanlah alasan bagi individu untuk larut dalam kekerasan. Individu sewajibnya menemukan bahwa pemisahan oleh yang sosial adalah syarat bagi kompleksitas relasi sosial yang sangat vital bagi kemerdekaan dan kapabilitas individu. Kekerasan sangat tercela karena ia adalah upaya putus asa yang tidak bertanggungjawab (*response + able*) untuk menegakkan keseragaman, yang di dalamnya individu berhenti merdeka, berhenti pula berkapabilitas.

Poin lain yang menurut saya penting dalam argumen Amartya Sen di buku *Identity & Violence* terkait individu dan kebebasannya adalah kegigihannya untuk melihat individu sebagai aktor sosial yang berdaya disebabkan karena relasi sosialnya dengan individu lain. Individu dilihat bukanlah pertama dan terutama sebagai pemilik hak yang rentan dilanggar haknya oleh orang lain. Individu, bagi Sen, dikarenakan sudah selalu hadir dalam kebersamaan orang lain, bukan hanya memiliki hak, namun

terutama memiliki *responsibility; capability* / keberdayaan dan kesanggupan merespon orang lain dalam adab.

Di titik ini, tanggungjawab sosial merupakan frase yang mubazir sebab tanggungjawab sudah sejak awal bersifat sosial, juga yang sosial sudah sejak awal meminta respon yang melebihi refleks primitif. Individu mendapati dirinya bertindak sebagai respon beradab atas orang lain sebab itulah satu-satunya modus dalam relasi dengan yang sosial.

Sen menutup paparan argumennya dalam buku *identity and violence* dengan menegaskan kembali bahwa kebebasan dimulai dan berakhir dalam pikiran. Individu dan masyarakat perlu menemukan metode mengembangkan kapasitas individu untuk menyingkirkan penghalang tumbuh kembangnya kebebasan berpikir, berkata, maupun bertindak. Ini dicapai bukan dengan mereduksi individu ke dalam satu kotak kecil identitas, melainkan memfasilitasi kemerdekaan individu untuk melihat, mengenal dan memilih beragam identitas yang tidak saling menggugurkan dalam kekerasan.

Diri sebagai Ruang Dialog menurut Hubert Hermans

Menarik sekali membaca Holda ketika ia menjelaskan *dialogical self theory* yang dicetuskan oleh Hubert Hermans. Bagi Hermans, diri (*self*) selalu dan senantiasa dalam kondisi memposisikan dirinya (*positioning*) dalam dialog dengan dunia yang terus menerus berubah. Diri dan dunia bukanlah dua entitas terpisah sebagaimana diklaim Descartes dan banyak positivis lainnya. Diri adalah bagian dari dunia. Jika dunia berubah terus menerus maka diri pun dipastikan berubah pula terus menerus.

Dalam matriks seperti ini, di mana identifikasi diri dalam dunia yang bergerak tanpa henti, maka identitas selayaknya dipahami sebagai terminal; diri datang, singgah sejenak, lalu beranjak pergi meninggalkan identitas (H. J. M. Hermans, 2014). Lazim dipahami bahwa identitas itu permanen layaknya sebuah benteng; kukuh melindungi dari hal-ihwal asing yang mengancam dari luar, sekaligus menyediakan ruang aman bagi diri dan komunitasnya. Bagi Hermans, diri dan identitas sebagai benteng hanyalah satu dari kemungkinan tanpa batas bentuk-bentuk identitas. Identitas sebagai benteng muncul dikarenakan diri memposisikan dirinya dalam dialog dengan realitas material, sosial, ekonomi, politik, psikologi, simbolik, teknologis yang kesemuanya secara

langsung menempatkan diri dalam posisi berdialog. Diri bisa saja memilih identitas serba terbatas yang memberi rasa aman dari apa-apa yang asing dan mengancam (ibarat benteng), namun diri yang sama dalam kondisi dialogis yang sama pun bisa memilih untuk beridentitas macam lilin; yang berani berjalan dalam gelap, menerangi gelap, lalu mengajak dengan asyik – juga agak gentar – yang lain yang tidak sepenuhnya asing namun juga tidak sepenuhnya akrab untuk berdialog.

Dialog, bagi Hermans, adalah satu-satunya modus meng-ada yang sehat oleh diri dalam dunia. Terbentuk dari kata prefiks latin *di-* (berarti dua, atau ganda) ditambahkan kata latin *logia* yang seakar dengan kata *logos* (berarti percakapan, intelek, pencerahan) dialog mempostulasikan bahwa diri, juga identitas, senantiasa dalam kondisi terbuka dan bersiap untuk berjumpa dengan dunia serta diri dan identitas yang lain. Bagi Hermans diri diibaratkan semacam spons yang dipenuhi ketidakutuhan alias ketidaklengkapan yang selalu membutuhkan perjumpaan dengan diri yang lain. Ketidakutuhan ini bukanlah sesuatu yang bagus untuk diratapi, melainkan mengundang kerendahan hati bagi hadirnya posisi etis dalam berhubungan dengan liyan.

Dikarenakan dialog merupakan kondisi alami bagi diri untuk mengada dalam dunia, maka diri sejatinya senantiasa bisa meninggalkan kekerasan saat berjumpa dengan yang lain. Bahkan diri, persisnya dikarenakan modus mengadanya yang berbentuk dialog, senantiasa merayakan perjumpaan dengan liyan. Orang lain, dalam hal ini yang beragama lain, dijumpai bukan sebagai subjek yang membawa derita dan butuh permakluman demi tegaknya ruang sosial. Bertentangan dengan itu. Orang lain dengan iman dan identitas berbeda berada dalam perjumpaan yang mengasyikkan dengan diri; orang lain dan diri ada dalam dunia yang terus mengelak untuk diringkus oleh kemandegan (Ouwehand et al., 2020).

Di titik inilah, saya melihat akseptansi beragama sebagai keniscayaan dalam ruang sosial masyarakat Indonesia yang dihuni oleh subjek dengan identitas yang beragama. Dengan postulasi teori dialogical self *a la* Hermans, akseptansi beragama memiliki fondasi yang kukuh sebagai pengganti yang efektif atas toleransi beragama. Orang lain yang berbeda, dalam dunia yang terus menerus berubah, sama sekali bukanlah subjek pembawa derita yang minta dimaklumi, melainkan sesama yang

kehadirannya menghadirkan dialog dengan diri, dan diri pada gilirannya, hanya akan eksis dalam/melalui dialog dalam dunia.

KESIMPULAN

Dengan mengelaborasi konsep dan praktik akseptansi beragama dalam perspektif Sen dan Hermans kita bisa melampaui praktik berbahasa toleransi beragama. Praktik berbahasa lintas agama di Indonesia dengan kosa kata toleransi selayaknya digantikan dengan praktik berbahasa lintas agama dengan kosa kata akseptansi. Selain tidak presisi memotret identitas dan relasi antar identitas umat beda agama, kata toleransi juga mencederai makna kehadiran diri yang berbeda di hadapan satu pemeluk agama yang berbeda sebab kata toleransi meneguhkan kehadiran pihak lain sebagai pihak pembawa derita yang minta dimalumi demi tegaknya yang sosial. Di lain pihak, akseptansi menegaskan keberbedaan sebagai natura dalam dunia yang terus menerus berubah, hal ini seturut dengan postulasi dalam teori *dialogical self* dari Hubert Hermans; orang lain beda agama bukanlah pihak yang membawa derita dan meminta permakluman, melainkan keberbedaan yang hadir begitu saja dan memperkaya identitas semua pihak yang terlibat dalam dialog. Dialog pada gilirannya adalah satu-satunya modus mengada diri yang sehat dalam dunia yang berubah terus menerus.

Toleransi, dalam tulisan ini, dipandang sebagai praktik hidup lintas agama yang tidak lagi mumpuni dalam merawat dan menghidupi keragaman keberagaman di Indonesia. Toleransi mempraanggapkan adanya kesanggupan pemeluk suatu agama untuk menanggung luka dan derita yang ditimbulkan oleh kehadiran pemeluk agama lain. Hal ini perlu dilampaui dengan akseptansi beragama, sebab, merujuk kepada postulasi kebebasan dan identitas yang dielaborasi oleh Amartya Sen, akseptansi mempraanggapkan bahwa individu dan kelompok pemeluk suatu agama menerima kehadiran pemeluk agama lain apa adanya, tanpa mesti mengganggu kehadiran pemeluk agama lain secara inheren membawa derita bagi orang lain, dikarenakan setiap individu dirangkapi berbagai lipatan identitas yang sangat beragam sekaligus. Keragaman rangkapan identitas ini memungkinkan setiap orang untuk menemukan setidaknya satu fondasi yang sama untuk berinteraksi secara bebas tanpa kekerasan

dengan orang lain. Bagi Sen, dikarenakan kerangkapan identitas yang menyangga individu sebagai hasil interaksinya dengan yang sosial, setiap orang, asal ia rendah hati untuk tidak memaksakan satu identitas, mampu menyapa dan bertemu dengan orang lain tanpa kekerasan dalam ruang sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Barthes, R. (2013). *Mythologies: The Complete Edition, in a New Translation* (R. Howard & A. Lavers, Trans.; Second edition). Hill and Wang.
- Fairclough, N. (2010). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (2 edition). Routledge.
- Gieser, T., & Hermans, H. J. M. (n.d.). *Handbook of Dialogical Self Theory*. 520.
- Hermans, H. (2012). *Dialogical Self Theory: Positioning And Counter-Positioning In A Globalizing Society* (Reprint edition). Cambridge University Press.
- Hermans, H. J. M. (2014). *Handbook of Dialogical Self Theory*. Cambridge University Press.
- Hołda, M. (2023). Interreligious Solidarity as a Benefit of Divine Hiddenness—On the Meaning of the Ambiguity of Religious Phenomena. *Religions*, 14(7), 866. <https://doi.org/10.3390/rel14070866>
- Miletzki, J., & Broten, N. (2017). *An analysis of Amartya Sen's Development as freedom*. Routledge.
- Ouwehand, E., Zock, H., & Muthert, H. (2020). Religious or Spiritual Experiences and Bipolar Disorder: A Case Study from the Perspective of Dialogical Self Theory. *Religions*, 11(10), 527. <https://doi.org/10.3390/rel11100527>
- Phan, P. J. (2004). *Being Religious Interreligiously; Asian Perspectives on Interreligious Dialogue*. Orbis Books.
- Sen, A. (2011). *Development as Freedom*. Knopf Doubleday Publishing Group.
- Sen, A. (2015). *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*. Penguin UK.
- Sofjan, D., & Asri, S. (2019). *Bridging the Unbridgable"; Dialectics of Religious Freedom and Harmony in Post- Reform Indonesia*. Islam & Liberty Network Conference.
- to accept*—Advanced search results in Entries | *Oxford English Dictionary*. (n.d.). Retrieved December 31, 2024, from <https://www.oed.com/search/advanced/Entries?q=to+accept&sortOption=Frequency>
- tolerate*—Advanced search results in Entries | *Oxford English Dictionary*. (n.d.). Retrieved December 31, 2024, from

<https://www.oed.com/search/advanced/Entries?textTermText0=tolerate&textTermOpt0=Definition&dateOfUseFirstUse=false&page=1&sortOption=Frequency>

Zainal Abidin Bagir, E. F. A. F. 9 N. 2021 16:15, & Husni Mubarak, D. 22 S. 2022 07:44. (2021, November 9). *Kebebasan, Kerukunan, dan/atau Moderasi Beragama?* tirta.id. <https://tirta.id/kebebasan-kerukunan-dan-atau-moderasi-beragama-glcu>